

BAB III

DINAMIKA PERMASALAHAN HAK PEKERJA (KERJA PAKSA) DI UZBEKISTAN

BAB III akan membahas profil negara Uzbekistan secara singkat. Dalam bab ini akan dibahas juga tentang pelanggaran hak pekerja yang terjadi di Uzbekistan mulai dari sejarah kerja paksa yang terjadi, pihak yang terlibat sistem kerja paksa yang diterapkan dan juga dampak apa saja yang terjadi akibat kerja paksa.

A. Profil Negara Uzbekistan

Uzbekistan merupakan sebuah negara yang terletak di Benua Asia Tengah. Secara astronomis Uzbekistan terletak pada 41°LU and 64°BT. Secara geografis, letak negara ini sangat strategis karena terletak di tengah kawasan Asia Tengah. Negara ini berbatasan dengan beberapa negara, yaitu Turkmenistan dan Afghanistan di sebelah selatan, dibagian timur berbatasan dengan Kirgiztan dan Tajikistan kemudian di sebelah barat dan di sebaelah utara berbatasan dengan Kazakhstan.

Uzbekistan merupakan negara terluas ke-57 di dunia dengan total 447.400 km². Terbagi menjadi wilayah daratan seluas 425.400 km², dan perairan seluas 22.000 km². Ibukota negara ini terletak di Tashkent. Secara administrasi wilayah Uzbekistan terbagi menjadi 12 provinsi atau dalam bahasa Uzbekistan disebut Viloyati, satu republik otonom dan juga satu kota independen. (KEMENTERIAN LUAR NEGERI, 2017)

Tabel 3. 1 Daftar Wilayah Uzbekistan

Provinsi (<i>Viloyati</i>)	Ibukota	Luas (km ²)	Populasi (2008)	Nomor daerah
Daerah Ibukota Tashkent	Tashkent	335	2,352,900	1
Andijan	Andijan	4,200	2,477,900	2
Bukhara	Bukhara	39,400	1,576,800	3
Fergana	Fergana	6,800	2,997,400	4
Jizzakh	Jizzakh	20,500	1,090,000	5
Namangan	Namangan	7,900	2,196,200	6
Navoiy	Navoiy	110,800	834,100	7
Kashkadarya	Karshi	28,400	2,537,600	8
Samarkand	Samarkand	16,400	3,032,000	9
Syrdarya	Gulistan	5,100	698,100	10
Surkhandarya	Termez	20,800	2,012,600	11
Tashkent	Tashkent	15,300	2,537,500	12
Khorezm	Urgench	6,300	1,517,600	13
Republik Karakalpakstan	Nukus	160,000	1,612,300	14

Sumber : <https://id.maps-uzbekistan.com/uzbekistan-peta>

Gambar 3. 1 Peta Wilayah Uzbekistan



Sumber : <https://id.maps-uzbekistan.com/uzbekistan-peta>

Seperti negara pada umumnya, Uzbekistan juga memiliki beberapa etnis dan suku. Mayoritasnya ialah etnis Uzbek sebanyak (8,1%). Etnis lainnya diantaranya ialah Russian (5,4%), Tajik (4,0%), Kazakh (3,0%), Karakalpak (2,5%), Tatar (1,5%), etnis pendatang atau blasteran (10%), dan etnis lain (2,5%).

Sebelum menjadi sebuah negara merdeka, Uzbekistan merupakan bagian dari Uni Soviet (1924-1991) dengan nama Uzbek Soviet Socialist Republic. Ketika Uni Soviet mengalami keruntuhan, pada 31 Agustus 1991 Uzbekistan mendeklarasikan kemerdekaannya dan hari kemerdekaan Uzbekistan kemudian ditetapkan menjadi 1 September 1991. Pada tanggal 29 Desember 1991, Uzbekistan menyelenggarakan pemilihan umum pertamanya untuk memilih presiden. Berdasarkan pemilu, Islam Karimov terpilih sebagai Presiden pertama dari Republik Uzbekistan.

Sebagai sebuah negara merdeka, Uzbekistan tentu membutuhkan devisa negara sebagai salah satu penunjang perekonomian. Dalam hal ini Uzbekistan mempunyai beberapa sektor utama dalam mensuplai perekonomiannya. Salah satu sektor utama devisa negara Uzbekistan adalah sektor pertanian yaitu kapas. Julukan kapas di Uzbekistan ialah “*white gold*”. Kapas juga dianggap sebagai *national treasure*. Namun produksi kapas yang melimpah inilah yang kemudian menjadi penyebab dari permasalahan kerja paksa yang terjadi di Uzbekistan

B. Kasus Kerja Paksa pada Pertanian Kapas di Uzbekistan

Bagi Uzbekistan, kapas merupakan *national treasure*. Rakyat Uzbekistan menjuluki kapas dengan julukan “*white gold*”. Kapas pertama kali ditanam di Uzbekistan sekitar 2000 tahun lalu yang dibawa oleh orang-orang China. Kemudian ketika Uzbekistan menjadi bagian dari Uni Soviet produksi kapas yang dihasilkan meningkat dengan pesat dan mampu menyokong perekonomian.

Kerja paksa di Uzbekistan bukanlah sebuah permasalahan baru namun telah terjadi sejak negara ini masih menjadi bagian dari Uni Soviet. Di masa itu, Uni Soviet yang berada dibawah pimpinan Stalin menerapkan sistem perekonomian terpusat yang membuat masyarakat tidak bebas dalam melakukan kegiatan perekonomian. Sistem ini membuat pemerintah memegang kendali lebih dalam mengatur perekonomian. (Ferreira, 2018)

Salah satu kebijakan yang dilakukan Stalin ialah melakukan swasembada yang bertujuan agar Uni Soviet menjadi negara yang mandiri. Caranya ialah dengan memerintahkan setiap negara bagiannya untuk menjadi produsen komoditas tertentu. Uzbekistan pun ditunjuk sebagai pemasok utama kapas bagi Uni Soviet. Selanjutnya semua

wilayah Uzbekistan ditanami kapas yang menyebabkan kapas menjadi tanaman monokultur. Luasnya wilayah pertanian kapas inilah yang kemudian membuat munculnya permasalahan kerja paksa. (Reyes, 2015)

Luas lahan yang digunakan sebagai ladang kapas mencakup hampir seluruh wilayah Uzbekistan sehingga membuat pemerintah mempekerjakan rakyat untuk membantu di pertanian. Di tahun 1976, Kepala Republik Sosialis Soviet Uzbekistan Sharaf Rashidov menyatakan kesediannya untuk menaikkan jumlah setoran kapas kepada pemerintah Uni Soviet. Dari empat juta ton menjadi 5,5 juta ton setiap tahunnya. Komitmen ini membuat rakyat Uzbekistan terjerumus kedalam praktik kerja paksa. Semua orang bekerja di pertanian kapas. Tidak hanya orang-orang dewasa namun juga anak-anak yang sampai berhenti dari sekolah dan membantu di pertanian kapas. Pemerintah Uni Soviet pada saat itu beranggapan bahwa hal ini merupakan sebuah bentuk balas budi rakyat Uzbekistan kepada pemerintah Uni Soviet. Dengan bekerja pada pertanian kapas sebagai ganti dari semua kebutuhan seperti makanan, air, dan sandang yang diberikan kepada rakyat. (Lindt, 2018)

Ketika Uzbekistan berhasil memperoleh kemerdekaannya di tahun 1991, praktik kerja paksa ini masih tetap berlanjut. Pasca kemerdekaannya, kondisi perekonomian negara Uzbekistan menjadi tidak stabil. Adanya peralihan sistem ekonomi dan juga Uni Soviet yang tidak lagi menyokong perekonomian negara menjadi penyebabnya. Di awal kemerdekaan banyak sektor ekonomi yang terhenti karena kurangnya dana. Disaat perekonomian masih tidak stabil kapas mampu bertahan untuk memenuhi kebutuhan negara. Kapas tetap menjadi komoditas utama bagi Uzbekistan. Meskipun jumlahnya yang dihasilkan tidak sebanyak saat era Uni Soviet namun kapas masih menjadi pendapatan utama bagi perekonomian Uzbekistan. Jumlah lahan yang ditanami kapas

pun berkurang. Di tahun 1990 tercatat sebanyak 1,8 juta hektar kemudian berkurang menjadi 1,4 juta hektar di tahun 2006. Hal ini dipicu adanya masalah yang disebabkan sistem monokultur dan juga untuk menghindari krisis pangan bagi rakyat Uzbekistan. sebab lainnya ialah masalah lingkungan yaitu kekeringan di Laut Aral dan polusi tanah yang disebabkan besarnya jumlah irigasi dan pupuk yang diperlukan ladang kapas yang tersebar di seluruh wilayah Uzbekistan (FAO, 2012).

Dengan kapas, dapat membantu menghidupkan sektor perekonomian lainnya. Keberhasilan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh pemerintah Uzbekistan untuk tetap mempertahankan praktik kerja paksa. Padahal saat presiden Islam Karimov terpilih menjadi presiden ia berjanji bahwa praktik kerja paksa akan dihapuskan. Yang mana hal ini merupakan harapan semua rakyat Uzbekistan setelah sekian lama dipaksa untuk bekerja di pertanian kapas oleh pemerintah Uni Soviet. Produksi kapas yang melimpah justru membuat rakyat menderita. Kapas memang mampu menyokong perekonomian terbesar namun dibalik keberhasilan tersebut berjuta-juta rakyat dirugikan.

Tidak banyak perubahan antara praktik kerja paksa yang terjadi di era Uni Soviet dan pasca kemerdekaan. Yang menjadi perhatian ialah sistem kerja paksa yang justru menjadi lebih parah dari sebelumnya. Terlebih lagi, kasus kerja paksa yang terjadi di Uzbekistan merupakan sebuah kasus yang unik karena dalang dari kasus kerja paksa ini tidak lain ialah pemerintahnya sendiri. Kerja paksa ini dikendalikan langsung oleh pemerintah pusat yang kemudian dibantu oleh pemerintah daerah.

Kapas mulai ditanam pada kisaran bulan April-Mei dan musim panen jatuh pada bulan September-November. Selama musim panen semua rakyat dipekerjakan di pertanian kapas.

Pemerintah juga menetapkan kuota yang harus dipenuhi oleh setiap orang. Di era ini anak-anak lebih banyak dipekerjakan oleh pemerintah. Tidak dapat dipastikan secara pasti berapa jumlah anak-anak yang dipekerjakan oleh pemerintah. Data yang diperoleh dari *Enviromental Justice Foundation (EJF)* NGO yang berbasis di London memeperkirakan sekitar 200.000 anak-anak dipekerjakan di wilayah Ferghana. Berdasarkan data yang ada di UNICEF pada tahun 2000 terdapat sekitar 22,6% anak-anak yang berumur antara 5-14 tahun mulai bekerja memanen kapas meskipun hanya paruh waktu. Anak-anak ini adalah tenaga kerja murah. Beberapa bahkan tidak dibayar sama sekali. Alasan pemerintah menggunakan anak-anak sebagai tenaga kerja ialah agar pemerintah tidak perlu membayar mahal upah selama bekerja. (Kandiyoti, 2009)

Pada tahun 2009-2011 upah yang diterima para pekerja hanya sebesar 100-125 soum atau sekitar 3 sen perkilonya. Jumlah upah ini paling rendah jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tengah yang mana memiliki tingkat pendapatan lebih rendah dari Uzbekistan. Di Tajikistan dan juga Kazakhstan upah yang diberikan dua kali lipat dibandingkan dengan Uzbeistan (10 sen). Jumlah upah yang dibayarkan juga menyesuaikan dengan kondisi kapas saat dipanen. Kapas yang dipetik saat periode pertama masa panen termasuk dalam kapas kelas satu dan mendapatkan upah paling besar. Semakin lama memetik kapas maka upah yang dibayarkan oleh pemerintah akan semakin berkurang.

Seorang reporter yang bekerja di *Ferghana.news* menyebutkan bahwa pemerintah enggan untuk berinvestasi mesin pemetik kapas. Karena menurut pemerintah kapas yang dipanen menggunakan tangan lebih bernilai. Selain itu dengan mepekerjakan rakyatnya terutama anak-anak pemerintah secara otomatis menghemat biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar mereka.

Anak-anak yang masih duduk di sekolah dasar mulai dikirim ke ladang kapas untuk bekerja. Selama dua bulan, dengan dalih libur mereka dipekerjakan untuk memanen kapas. Pemerintah daerah dan staf sekolah mengawasi pekerjaan mereka di ladang kapas. Kepala sekolah juga memberikan mereka target kuota yang harus dipenuhi setiap harinya.

Jumlah kuota yang harus dipenuhi oleh setiap anak berbeda-beda. Bagi anak-anak yang berusia lebih tua berkisar 50-60kg sedangkan usia yang lebih muda sekitar 10 kg. Ada hukuman yang menanti anak-anak ini jika mereka tidak berhasil mengumpulkan kapas sesuai dengan kuota yang ditetapkan. Hukuman ini bisa berupa ancaman pengurangan nilai, tidak naik kelas bahkan dikeluarkan dari sekolah.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari sembilan provinsi di Uzbekistan yaitu Jizzakh, Fergana, Namangan, Syr Daria, Surkhandaria, Bukhara, Khorezm, Tashkent dan Samarkand bahwasanya pekerjaan memanen kapas biasanya dimulai pada minggu ketiga bulan September. Di penghujung bulan September, ketika memasuki musim hujan tekanan yang diberikan pemerintah semakin besar. Pemerintah berusaha untuk mengumpulkan kapas sebelum hujan turun. Di wilayah Samarkand, tidak hanya anak-anak sekolah dasar namun juga mahasiswa. Setiap hari saat musim panen, pemerintah daerah dan juga pihak sekolah secara bergantian mengunjungi ladang kapas guna memastikan anak-anak tersebut bekerja dengan benar dan memenuhi target panen. Anak-anak ini tidak bisa menolak, karena ada ancaman dan juga sanksi yang akan diberikan oleh pihak sekolah jika mereka menolak. Sanksi ini berupa nilai mereka diturunkan, dikeluarkan dari sekolah hingga dipukul.

Anak-anak diminta untuk berjalan sendiri menuju ladang kapas jika letaknya 5-10 km jauhnya dari sekolah mereka.

mereka diharuskan untuk membawa makanan dan minum sendiri. Jam kerja mereka antara tujuh atau delapan jam setiap harinya dan waktu istirahat yang diberikan hanya cukup untuk makan siang.

Meskipun telah terjadi sejak lama, namun kasus ini baru mendapat perhatian publik pada sekitar akhir tahun 1990-an. Dibawah kepemimpinan Presiden Islam Karimov yang otoriter para aktivis Uzbekistan dibungkam. Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah agar kasus ini tidak di dengar oleh publik. Banyak aktivis HAM yang berusaha untuk menguak kasus ini pada publik justru berakhir dipenjara oleh pemerintah. Tidak hanya aktivis namun juga awak media dan jurnalis yang berusaha memberitakan kasus kerja paksa di Uzbekistan. Kebebasan pers sangat dibatasi oleh pemerintah. Hampir semua media, baik media cetak maupun elektronik dikuasai oleh negara. Outlet media tidak boleh berdiri secara independen dan harus mendapatkan izin dari pemerintah. Akibatnya apa yang dimuat oleh media sangat bertentangan dengan kenyataan yang terjadi. (Enviromental Justice Foundation, 2005)

Media hanya memberitakan bagaimana kesejahteraan dan investasi Uzbekistan yang meningkat tanpa menyoroti kerja paksa dan kasus pelanggaran HAM yang terjadi. Jurnalis yang kedapatan menentang pemerintah dengan memberitakan kejadian yang sebenarnya terjadi akan mendapatkan hukuman. Telah banyak jurnalis yang ditangkap, disiksa dan juga dipenjarakan oleh pemerintah. Sebelumnya mereka akan mendapatkan ancaman melalui telepon agar berhati-hati dalam menyampaikan sebuah berita. Ketika mereka tetap dengan pendiriannya dengan merilis berita yang mengkritisi kebijakan pemerintah maka mereka akan langsung ditangkap. (Enviromental Justice Foundation, 2005)

Ketika kasus ini mulai mendapatkan perhatian publik, pemerintah Uzbekistan mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Pemerintah menyangkal bahwa terjadi kerja paksa yang dikendalikan oleh pemerintah. Mereka beralih bahwasanya apa yang dilakukan rakyat ialah sebuah bentuk pengabdian seorang rakyat kepada negara. Mengutip ucapan presiden Islam Karimov saat itu bahwasanya kapas merupakan simbol dari kesucian. Orang yang mampu menanam kapas hanya orang yang mempunyai pikiran yang bersih dan jiwa yang indah.

Meskipun terus disangkal, banyak bukti-bukti yang menunjukkan adanya praktik kerja paksa yang terjadi di Uzbekistan. Pemerintah pun terus mendapatkan tekanan dari berbagai pihak baik dari aktivis HAM, NGO maupun organisasi internasional. Namun sangat disayangkan karena pemerintah sangat membatasi pergerakan media dan NGO yang berusaha menyelidiki kasus ini.

Karena banyaknya tekanan dan munculnya kekhawatiran kapas Uzbekistan akan dicekal, di tahun 2012 pemerintah akhirnya mengurangi jumlah anak-anak yang bekerja di pertanian kapas. Namun, permasalahan kerja paksa ini tidak berhenti sampai disitu. Pengurangan jumlah anak-anak ini membuat jumlah orang dewasanya semakin meningkat (Uzbek German Forum, 2011). Pemerintah memerintahkan orang tua dari anak-anak tersebut untuk menggantikan anak-anak mereka bekerja di pertanian kapas. Tidak peduli apapun profesinya mereka harus bekerja memanen kapas. Jika menolak maka pemerintah tidak segan untuk memecat dari pekerjaan mereka. selama musim panen, mereka libur dari pekerjaan mereka dan bekerja di pertanian. Ketika tidak sedang memanen kapas mereka dapat bekerja seperti biasa. Dalam hal ini, pimpinan atau bos di tempat mereka bekerja adalah pimpinan mereka saat bekerja memanen kapas. Pekerjaan

memanen kapas juga dimasukkan kedalam penilaian karyawan. (International Labor Right Forum, 2013)

Data yang didapatkan oleh *US Department of Agriculture* menyebutkan bahwa Uzbekistan tidak mengimpor kapas mentah. Pemerintah Uzbekistan memfasilitasi perusahaan yang mengolah kapas tersebut. Ketika selesai dipanen, perusahaan akan membeli kapas tersebut dari pemerintah dan kemudian mengolahnya menjadi benang, kain dan pakaian. Pemerintah Uzbekistan mempertahankan kontrol atas pasokan kapas ke semua perusahaan melalui kontrak penjualan melalui *Uzbeklegprom* atau *Association of State Cotton Enterprises* dan *Uzbekengilsanoat* atau *State-owned Joint Stock Company*. Melalui kontrak ini pemerintah memberikan keistimewaan kepada perusahaan yang menjadi mitranya salah satunya ialah *Daewoo International* dengan memberikan harga murah.

Menurut Departemen Hubungan Ekonomi Luar Negeri Uzbekistan, Perdagangan dan Investasi, perusahaan yang membangun fasilitas pemrosesan kapas di Uzbekistan menerima diskon 15% untuk harga serat kapas. Perusahaan yang setuju untuk sepenuhnya memproses kapas menjadi produk jadi dan mengekspor setidaknya mendapatkan diskon 80% dan 5% tambahan. Perusahaan juga menerima pembebasan pajak dan bea cukai insentif. (International Labor Right Forum, 2013)

C. Hukum dan Perjanjian di Uzbekistan

1. Konstitusi Uzbekistan

Pada Konstitusi dan Kode Perburuhan Uzbekistan telah disebutkan adanya larangan eksploitasi di sektor ekonomi. Dalam pasal 37 terdapat larangan melaksanakan kerja paksa kecuali sebagai sanksi yang ditetapkan dan disetujui oleh pengadilan. Dalam Kode Tenaga Kerja Uzbekistan disebutkan bahwasanya usia minimum bagi anak-anak untuk bekerja adalah 16 tahun. Meskipun

dalam kondisi tertentu anak-anak di usia 14 tahun telah diperbolehkan untuk bekerja tetapi terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yaitu bekerja setelah jam belajar atau diluar jam sekolah, melakukan pekerjaan yang ringan dan tidak membahayakan kesehatan maupun perkembangan moral serta mendapatkan izin dari orang tua maupun wali. Meskipun Uzbekistan telah mengatur hal ini dalam undang-undang negaranya pada kenyataannya eksploitasi anak tetap terjadi bahkan dikendalikan langsung oleh pemerintah. Konvensi yang di ratifikasi pun tidak membuat perubahan yang berarti. Kerja paksa masih terus dilakukan dan berlanjut seperti biasa. Anak-anak tetap dikirim ke ladang kapas setiap musim panen. Pemerintah tidak menanggapi dengan serius konvensi yang telah diratifikasi. Permintaan pasar terhadap kapas yang tinggi mendorong pemerintah untuk terus menggunakan semua sumber dayanya secara brutal. (United States Department of Labor, 2010)

2. Konvensi Internasional

Sejak kemerdekaannya di tahun 1991, Uzbekistan telah menjadi anggota dari beberapa organisasi internasional seperti United Nation dan juga ILO. Uzbekistan menjadi anggota UN di tahun 1992 menyusul kemudian ILO di tahun yang sama. Kemudian, ketika berbicara mengenai permasalahan kerja paksa yang terjadi di negara ini, Uzbekistan sendiri telah meratifikasi beberapa konvensi yang berhubungan dengan masalah kerja paksa, diantaranya :

1. *UN Convention on the Rights of the Child* 1989 disetujui pada 23 Desember 2008.
2. *International Convention on Civil and Political Rights (Article 8)* diratifikasi pada 28 September 1995.

3. ILO *Minimum Age Convention* 1973, diratifikasi pada 06 Maret 2009.
4. ILO *Convention 182 on the Worst Forms of Child Labor*, diratifikasi pada 24 Juni 2008.
5. ILO *Abolition of Forced Labor Convention* (No. 105) 1957, diratifikasi pada 15 Desember 1997.
6. ILO *Forced Labor Convention* (No. 29) 1930, diratifikasi pada 13 Juli 1992 (ILO, 2012)

Dari konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Uzbekistan, telah jelas disebutkan adanya larangan menggunkan tenaga kerja anak dan larangan kerja paksa. Seperti pada UN *Convention on the Right of the Child* 1989 pasal 28 ayat (e) secara tegas menyebutkan bahwa negara mengakui hak anak atas pendidikan dan harus mendorong anak-anak agar dapat hadir di sekolah secara rutin dan mengurangi angka putus sekolah. Kemudian di pasal 31, anak-anak berhak untuk bersantai, bermain maupun beristirahat sesuai dengan yang mereka inginkan. Di pasal 32 anak-anak berhak mendapatkan perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan dari melakukan pekerjaan yang berbahaya maupun pekerjaan yang dapat mengganggu pendidikan mereka. Negara juga diharuskan untuk mengatur hukum mengenai usia minimum anak-anak dibolehkan bekerja, waktu dan kondisi bekerja serta sanksi jika hal tersebut tidak terpenuhi.

Pada *Minimum Age Convention* 1973 dan *Convention 182 on the Worst Forms of Child Labor* yang di ratifikasi oleh Uzbekistan menjelaskan adanya larangan untuk mempekerjakan anak-anak dibawah usia 18 tahun dalam pekerjaan yang berbahaya. Konvensi ini mengkategorikan bentuk kerja yang buruk seperti perbudakan atau hal serupa seperti perdagangan anak dan kerja paksa. Yang dimaksud dengan pekerjaan berbahaya ialah :

"pekerjaan yang, berdasarkan sifatnya atau keadaan di mana itu dilakukan, cenderung membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak".
(United States Department of Labor, 2011)

Pekerjaan ini mencakup pekerjaan dengan mesin ataupun alat berbahaya, kondisi yang sulit seperti berjam-jam atau dilakukan di malam hari, pekerjaan yang tidak memungkinkan untuk kembali ke rumah setiap hari, dan juga pekerjaan yang membuat anak-anak terkena (United States Department of Labor, 2011) zat-zat berbahaya yang dapat mempengaruhi kesehatan mereka.

D. Dampak Kerja Paksa di Uzbekistan

Permasalahan kerja paksa yang terjadi di Uzbekistan tentu berdampak bagi kehidupan masyarakat. Banyak sekali kerugian yang dirasakan oleh rakyat akibat kebijakan pemerintah ini. Tindakan pemerintah jelas melanggar hukum dan tidak dapat dibenarkan. Beberapa dampak yang dirasakan oleh rakyat Uzbekistan diantaranya ialah :

1. Dampak di Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang penting bagi setiap individu. Pendidikan baik formal maupun informal dapat mengarahkan individu menuju bakat dan juga potensinya. Semua orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Dalam UDHR telah disebutkan bahwa salah satu hak individu ialah mendapatkan pendidikan. Di Uzbekistan, hampir semua rakyat yang dipekerjakan di pertanian kapas ialah mereka yang masih bersekolah. Mulai dari sekolah dasar hingga universitas.

Dengan kondisi sekolah yang ditutup selama dua bulan secara langsung anak-anak ini telah kehilangan kesempatan untuk mendapat pendidikan. Hal ini semakin dipersulit dengan adanya paksaan dari orang

tua yang juga mendapatkan ancaman dari pemerintah. Para orang tua mendapatkan tekanan sehingga mereka tidak mempunyai pilihan lain selain meminta anak-anak mereka untuk bekerja di pertanian kapas.

Keadaan ini dapat menjadi lebih buruk bagi mereka yang tinggal di pedesaan. Anak-anak yang tinggal di pedesaan tidak hanya bekerja di saat musim panen, namun juga ketika musim semi atau saat masa tanam. Pekerjaan mereka tidak hanya memanen kapas di saat panen namun juga menyiapkan ladang untuk ditanami kapas. Keadaan ini membuat anak-anak di pedesaan mengalami kerugian yang lebih besar dibandingkan dengan anak-anak di kota. Akses pendidikan di desa yang cukup sulit juga semakin membuat anak-anak di desa merasa mereka tidak mampu bersaing dengan anak-anak di kota. Meskipun hal ini terus mendapatkan penolakan dari beberapa guru dan juga para orang tua namun tidak ada yang bisa dilakukan. Pemerintah dan pihak sekolah terus menekan para orang tua agar anak-anak mereka tetap bekerja di pertanian kapas. Anak-anak tidak diperbolehkan untuk absen dari memanen kapas jika tidak mempunyai surat keterangan dari dokter. Namun hal ini juga tidak mudah karena pemerintah telah menekankan kepada dokter untuk meminimalisir jumlah surat izin (Uzbek German Forum, 2011)

Gambar 3. 2 Daftar Absensi Sekolah Uzbekistan

The image shows a handwritten attendance sheet from Uzbekistan. At the top, it says '7 shirkas, Madaniylik' and 'Joshi mazari (J.N.A.) Tashkent no 1-pat. (T.K.)'. Below this is a grid with columns for dates from 01 to 31 and rows for names. Two names, 'Dilora Khammatova', are written vertically in the middle of the grid. The bottom of the page has a signature and date.

Sumber :

<http://www.cottoncampaign.org/uploads/3/9/4/7/39474145/cotton-its-not-a-plant-its-politics-ugf.pdf>

2. Dampak di Bidang Kesehatan

Pasca kemerdekaannya, kondisi kerja paksa menjadi semakin buruk. Pekerjaan di pertanian kapas merupakan sebuah pekerjaan yang berat dan juga berbahaya. Pekerjaan ini bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah dikerjakan oleh anak-anak. Kondisi ladang kapas dan juga cuaca sangat mempengaruhi kesehatan anak-anak yang bekerja di ladang kapas.

Anak-anak dipekerjakan selama delapan jam/hari beberapa bahkan dipekerjakan secara terus menerus. Anak-anak yang bekerja di pertanian kapas diperbolehkan untuk kembali ke rumah ketika malam hari. Namun anak-anak yang lebih tua diminta untuk tetap berada di pertanian kapas dan tinggal di asrama

sementara atau ruang kelas dengan kondisi yang tidak layak.. Berdasarkan keterangan yang diperoleh, anak-anak menggambarkan bagaimana kondisi asrama dimana tidak ada listrik, jendela maupun pintu dan juga kurangnya air bersih dan makanan yang sehat. Dengan kondisi tempat tinggal yang tidak layak dan juga kerja yang terus menerus dilaporkan bahwa selama dua tahun terdapat delapan orang anak-anak yang meninggal di wilayah Samarkand.

Gambar 3. 3 Kondisi Barak di Ladang Kapas



Sumber :<http://www.cottoncampaign.org/uploads/3/9/4/7/39474145/cotton-its-not-a-plant-its-politics-ugf.pdf>

Kondisi ladang kapas dan juga kurangnya perhatian pemerintah terhadap makanan dan juga kelayakan tempat tinggal membuat para pekerja rentan terkena penyakit terutama mereka yang masih anak-anak. Seperti yang diketahui bahwasanya bekerja di pertanian kapas merupakan pekerjaan yang berbahaya. Kesaksian seorang anak yang diwawancarai mengungkapkan bahwa mereka diberi botol plastik yang berisikan pestisida dan diminta untuk menyemprotkannya pada kapas. Tidak ada

pemberitahuan dari pemerintah bahwa ada penggunaan bahan kimia. Meskipun bisa berakibat fatal pada anak-anak namun pemerintah bersikeras bahwa bahan kimia tersebut tidaklah berbahaya. Setiap hari mereka bernapas dengan menghirup residu bahan kimia dan juga pestisida berbahaya yang digunakan sebelum masa panen. Hal ini membuat anak-anak yang bekerja rentan terkena penyakit menular. Yang paling sering menyerang ialah hepatitis. Penyakit lain yang disebabkan kondisi ini ialah infeksi usus, infeksi saluran pernapasan, meningitis dan juga hepatitis. Saat sakit, pemerintah tidak bertanggung jawab atas biaya pengobatannya. Obat dan semua perawatan menjadi tanggung jawab orang tua. (Uzbek German Forum, 2011)

Selain itu, masyarakat yang sedang sakit ketika musim panen mengalami kesulitan untuk berobat ke rumah sakit. Hal ini dikarenakan semua tenaga medis baik dokter maupun perawat turut dikerahkan untuk bekerja di ladang kapas. Seorang dokter bernama Tamara Khidoyatova yang bekerja di rumah sakit di Samarkand mengungkapkan bahwa saat musim panen ia akan meninggalkan rumah sakit tempatnya bekerja untuk bergabung bersama masyarakat lainnya bekerja di memanen kapas. Keadaan ini berlangsung beberapa minggu selama musim panen. Waktu yang dihabiskan tiap orang berbeda-beda. Beberapa hanya sehari sedangkan yang lainnya bisa sampai sebulan. Mereka akan dibayar murah atau bahkan tidak mendapatkan bayaran sama sekali. Mereka akan bekerja dari pagi hingga sore hari dengan jumlah minimal kapas yang harus dikumpulkan sebanyak 54 kg. (Finance Detik, 2013)

Ketika memanen kapas, para pekerja secara insentif menggunakan jari-jarinya dan juga berdiri

selama berjam-jam. Hal ini menyebabkan para pekerja mengalami sakit pada jari, persendian, sakit punggung, perut dan juga dada yang disebabkan kapas dan debu yang terhirup. Berikut tabel yang berisikan kondisi dan masalah kesehatan yang dialami oleh pekerja.

Tabel 3. 2 Dampak Kerja Paksa pada Kesehatan

No.	Masalah Kesehatan	Jumlah	Persentase
1.	Sakit Punggung	21	52.5%
2.	Nyeri sendi	28	70%
3.	Masalah pernapasan	19	47.5%
4.	Sakit pada tungkai	9	22.5%
5.	Cedera otot	16	40%

Sumber: *Child Labour in the Cotton Industry of Uzbekistan: a sociological study*